

## PERAN BMT AGAM MADANI KOTO TANGAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI PASAR PAKAN KAMIS DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN SGDS 8

Andri Oktananda Putra<sup>1</sup>, Iiz Izmuddin<sup>2</sup>

UN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

e-mail: [andriokta659@gmail.com](mailto:andriokta659@gmail.com)<sup>1</sup>, [iizmuddin@uinbukittinggi.ac.id](mailto:iizmuddin@uinbukittinggi.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstrak** – saha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif serta penciptaan lapangan kerja, terutama pada sektor ekonomi lokal. Namun, pelaku UMKM di Pasar Pakan Kamis masih menghadapi berbagai kendala struktural, seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi keuangan, dan lemahnya pengelolaan usaha. Kehadiran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah diharapkan mampu menjadi solusi alternatif melalui penyediaan pembiayaan yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini berfokus pada peran BMT Agam Madani Koto Tangah dalam pemberdayaan UMKM di Pasar Pakan Kamis serta keterkaitannya dengan pencapaian SDGs 8 yang menekankan pertumbuhan ekonomi inklusif dan penciptaan pekerjaan layak. Tujuan penelitian adalah menganalisis bentuk peran BMT melalui pembiayaan dan pendampingan usaha serta kontribusinya terhadap peningkatan produktivitas, pendapatan, dan keberlanjutan usaha UMKM. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap pengelola BMT dan pelaku UMKM. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran empiris yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Agam Madani Koto Tangah berperan dalam menyediakan akses pembiayaan syariah yang relatif mudah dan terjangkau. Pembiayaan tidak hanya menjadi tambahan modal, tetapi juga meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab finansial pelaku UMKM. Selain itu, pendampingan usaha berkontribusi terhadap stabilitas dan keberlanjutan usaha, meskipun pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan sosialisasi dan sistem pendampingan yang belum terstruktur secara maksimal.

**Kata Kunci:** BMT, UMKM, Pembiayaan Syariah, Pemberdayaan Ekonomi, SDG8.

**Abstract** – Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a significant role in promoting inclusive economic growth and creating employment opportunities, particularly within local economic sectors. However, MSME actors in Pasar Pakan Kamis continue to face various structural challenges, including limited access to capital, low financial literacy, and weak business management practices. The presence of Baitul Maal wat Tamwil (BMT) as a sharia-based microfinance institution is expected to provide an alternative and effective solution through fair and sustainable financing mechanisms. This study examines the role of BMT Agam Madani Koto Tangah in empowering MSMEs in Pasar Pakan Kamis and its relevance to achieving SDG 8, which focuses on inclusive economic growth and decent work opportunities. The objective is to analyze the forms of BMT's role through financing and business mentoring, as well as its contribution to improving productivity, income, and business sustainability among MSMEs. The research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation involving BMT management and MSME actors. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing to obtain a comprehensive empirical understanding. The findings indicate that BMT Agam Madani Koto Tangah provides relatively accessible and affordable sharia-based financing. The financing not only serves as additional business capital but also promotes financial discipline and responsibility among MSME actors. Furthermore, business mentoring contributes to business stability and sustainability, although its implementation remains less than optimal due to limited outreach and the absence of a structured mentoring system.

**Keywords:** BMT, MSMEs, Sharia Financing, Economic Empowerment, SDG 8.

## PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan merupakan agenda global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai respons terhadap berbagai tantangan pembangunan dunia, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, degradasi lingkungan, dan keterbatasan sumber daya alam. Komitmen global tersebut secara resmi dituangkan dalam penetapan Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2015, yang menggantikan agenda sebelumnya, yaitu Millennium Development Goals (MDGs) (Seyedsayamdost, 2020).

SDGs merupakan seperangkat 17 tujuan pembangunan yang saling terkait dan tidak bisa di pisahkan, dengan fokus utama pada antara dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan dalam pelaksanaan pembanguana. Konsep ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya dinilai dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya dalam mewujudkan keadilan sosial, mengurangi ketimpangan, menjaga kelestarian lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh (Darmawan, 2025). Selain itu, SDGs mengedepankan prinsip inklusif dan berkelanjutan, yaitu memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh manfaat pembangunan tanpa ada yang terpinggirkan, termasuk kelompok miskin, rentan, dan pelaku usaha kecil. Pembangunan berkelanjutan menekankan upaya memenuhi kebutuhan saat ini dengan tetap menjaga agar generasi mendatang memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan mereka di masa depan kebutuhannya, sehingga setiap kebijakan pembangunan harus dilaksanakan secara adil, bertanggung jawab, dan berorientasi jangka panjang. (Zen & Mageiasti, 2025).

Dengan demikian, SDGs menjadi kerangka global yang komprehensif dalam mengarahkan kebijakan pembangunan nasional dan lokal agar selaras dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Salah satu tujuan utama dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs) adalah Tujuan 8 (SDGs 8), yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Decent Work and Economic Growth), yang menitikberatkan pada upaya mendorong kesempatan kerja yang bermartabat, peningkatan kinerja produktif, serta penguatan pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan menekankan pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. (Lou et al., 2024) SDGs 8 berfokus pada peningkatan produktivitas ekonomi melalui diversifikasi, inovasi, dan pengembangan usaha, serta penciptaan kesempatan kerja yang layak dan produktif, khususnya bagi kelompok rentan dan pengusaha yang menjalankan usaha pada tingkat mikro dan kecil

Tujuan ini menekankan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dinilai dari peningkatan output maupun pendapatan nasional, melainkan juga dari sejauh mana perekonomian mampu membuka peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, serta menekan angka pengangguran dan kemiskinan (Karangnom et al., 2023). Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, upaya mewujudkan SDGs 8 sangat berkaitan dengan penguatan ekonomi kerakyatan, khususnya melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berperan besar sebagai penyerap tenaga kerja utama.

Ponto menyatakan bahwa keberhasilan SDGs 8 sangat bergantung pada kemampuan negara dan lembaga pendukungnya dalam memberdayakan sektor usaha mikro dan kecil, karena sektor ini berperan penting dalam membuka peluang kerja, meningkatkan taraf pendapatan masyarakat, serta membantu menekan ketimpangan ekonomi di berbagai lapisan sosial. (Pratiwi et al., 2023) Oleh karena itu, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan UMKM dan penciptaan pekerjaan yang layak menjadi strategi kunci dalam mewujudkan tujuan SDGs 8 secara berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan masyarakat (Aftitah et al., 2025).

Merujuk pada data dari kementerian usaha mikro kecil dan menengah koperasi

mendominasi lebih dari 99% struktur usaha di Indonesia serta menyerap lebih dari 90% tenaga kerja nasional, sehingga keberlangsungan sektor ini sangat menentukan stabilitas ekonomi nasional, khususnya dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Selain kontribusinya yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, UMKM juga memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) dan berperan sebagai penggerak utama ekonomi lokal, terutama di wilayah pedesaan dan pasar tradisional (Hapsari et al., 2024). Hafsah (2004) menegaskan bahwa UMKM memiliki fungsi penting dalam menciptakan pemerataan pendapatan, memperluas kesempatan berusaha, serta mengurangi tingkat kemiskinan melalui aktivitas ekonomi berbasis masyarakat.

Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Santoso (2020) yang menegaskan bahwa pengembangan UMKM menjadi strategi yang efektif dalam mendorong tercapainya pembangunan berkelanjutan, karena karakteristiknya yang fleksibel, adaptif, serta memiliki ketahanan tinggi dalam menghadapi berbagai tekanan dan krisis ekonomi (Mulia & Sitepu, 2023). Meskipun demikian, di balik peluang dan kontribusi besarnya, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. tersebut, pelaku UMKM di pasar pakan kami masih menghadapi berbagai permasalahan struktural yang menghambat perkembangan usaha mereka, antara lain keterbatasan akses terhadap permodalan formal, rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan, lemahnya manajemen dan pencatatan keuangan usaha, serta keterbatasan akses pasar dan ekonomi yang sulit (Jurnal et al., 2025).

Berbagai kendala tersebut menyebabkan banyak UMKM sulit meningkatkan skala usaha, produktivitas, dan daya saing, sehingga dibutuhkan dukungan yang lebih terfokus dari pemerintah maupun institusi keuangan, termasuk lembaga keuangan mikro, agar UMKM mampu tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi maksimal bagi perekonomian nasional. Dalam menghadapi berbagai kendala struktural yang kerap dialami pelaku UMKM—seperti terbatasnya akses terhadap permodalan, rendahnya tingkat literasi keuangan, serta kurangnya kemampuan manajerial—peran lembaga keuangan mikro menjadi sangat penting, terutama lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.(Hendri, 2018).

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berperan langsung dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT dirancang sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi keuangan, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat melalui skema pembiayaan berbasis syariah, tetapi juga mengemban peran sosial dan pemberdayaan ekonomi (Fitria & Qulub, 2020). Dalam praktiknya, BMT menyediakan pembiayaan yang relatif mudah diakses oleh pelaku UMKM, menggunakan prinsip keadilan, kemitraan, dan bagi hasil, sehingga mampu menjangkau kelompok usaha mikro yang seringkali tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal. Selain itu, BMT juga berperan sebagai lembaga pemberdayaan dengan memberikan pendampingan usaha, pelatihan manajemen dan pencatatan keuangan, serta penguatan kapasitas kewirausahaan bagi pelaku UMKM supaya dapat mengelola dan mengembangkan usahanya secara lebih profesional, efektif, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.(Tussa, 2024).

Fitria dan Qulub (2020) menegaskan bahwa fungsi BMT tidak semata-mata terbatas sebagai penyedia pembiayaan atau sumber permodalan saja usaha, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan pelaku usaha mikro. Lebih lanjut, penelitian Kurniawan dan Rahman (2024) menunjukkan bahwa BMT memiliki kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 8, khususnya melalui peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM, mendorong pertumbuhan usaha mikro, serta menciptakan lapangan kerja di tingkat lokal (Nasution et al., 2024). Dengan demikian, BMT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang berperan penting dalam mewujudkan

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Di tingkat lokal, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Agam Madani Koto Tengah adalah salah satu lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang beroperasi di wilayah Kabupaten Agam dan berperan strategis dalam memberikan layanan serta mendorong pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). (Tamwil & Syariah, 2024). Kehadiran BMT memiliki peran yang sangat penting karena berinteraksi secara langsung dengan pelaku usaha kecil di lingkungan sekitarnya, termasuk UMKM yang menjalankan aktivitas ekonomi di Pasar Pakan Kamis sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat lokal. Pasar Pakan Kamis sendiri didominasi oleh pelaku usaha mikro yang beroperasi di beragam bidang, seperti perdagangan kebutuhan sehari-hari, usaha kuliner, kerajinan tangan, serta berbagai layanan jasa, yang berperan sebagai mata pencaharian utama bagi mayoritas masyarakat setempat.

Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar dan perputaran uang yang cukup aktif, pelaku UMKM di pasar ini masih menghadapi berbagai kendala dalam mengembangkan usahanya. Permasalahan yang umum dijumpai antara lain keterbatasan modal usaha untuk meningkatkan skala produksi, lemahnya pencatatan dan pengelolaan keuangan usaha, minimnya inovasi dalam strategi pemasaran, serta rendahnya pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan usaha (Mikro & Umkm, 2015). Kondisi ini menyebabkan banyak UMKM sulit meningkatkan produktivitas dan daya saing, sehingga pertumbuhan usaha cenderung stagnan. Beberapa penelitian sebelumnya menandakan bahwa pelaku usaha mikro di pasar tradisional masih mengandalkan pada pembiayaan informal dan belum sepenuhnya tersentuh layanan keuangan yang terstruktur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peran BMT Agam Madani Koto Tengah menjadi sangat penting sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang tidak hanya memberikan kemudahan akses pembiayaan, tetapi juga memiliki potensi untuk menghadirkan pendampingan usaha, meningkatkan literasi dan edukasi keuangan, serta mendorong pemanfaatan teknologi sederhana guna memperkuat kapasitas serta keberlangsungan UMKM di Pasar Pakan Kamis. (Zuhdi & Sukartaatmadja, 2023).

Tabel 1. Data Nasabah UMKM di BMT Agam Madani Koto Tengah

Tahun	Jumlah Nasabah BMT	UMKM
2022	38	9
2023	23	2
2024	30	3

*Sumber: BMT Agam Madani Koto Tengah*

Berdasarkan Data di atas menunjukkan perkembangan jumlah nasabah BMT Agam Madani Koto Tengah dan jumlah nasabah yang berasal dari sektor UMKM selama periode tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 38 orang nasabah BMT, namun hanya 9 di antaranya yang merupakan pelaku UMKM. Selanjutnya, pada tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup signifikan, baik pada jumlah nasabah secara keseluruhan maupun nasabah UMKM, yaitu menjadi 23 nasabah dengan hanya 2 pelaku UMKM. Kondisi ini mengindikasikan adanya penurunan minat atau keterlibatan pelaku UMKM dalam memanfaatkan layanan pembiayaan BMT pada tahun tersebut. Pada tahun 2024, jumlah nasabah kembali mengalami peningkatan menjadi 30 orang, namun jumlah nasabah UMKM hanya naik sedikit menjadi 3 pelaku usaha. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun BMT Agam Madani Koto Tengah memiliki jumlah nasabah yang relatif fluktuatif, proporsi pelaku UMKM yang menjadi nasabah masih tergolong rendah dan belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

Hal ini mengindikasikan bahwa peran BMT dalam menjangkau dan memberdayakan pelaku UMKM, khususnya di Pasar Pakan Kamis, belum optimal dan masih memerlukan penguatan strategi pembiayaan, sosialisasi, serta pendampingan usaha agar dapat mendorong peningkatan partisipasi UMKM secara berkelanjutan. Keberadaan BMT Agam Madani Koto

Tengah diharapkan mampu menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM di Pasar Pakan Kamis melalui penyediaan pembiayaan syariah yang inklusif, pendampingan usaha, serta penguatan kapasitas kewirausahaan.

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi di tingkat lokal, BMT memiliki keunggulan dalam menjangkau pelaku usaha mikro yang selama ini sulit mengakses lembaga keuangan formal, baik karena keterbatasan agunan, skala usaha yang kecil, maupun rendahnya literasi keuangan (Syafira rahmi, 2025). Melalui skema pembiayaan berbasis prinsip syariah, seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, serta pendekatan kemitraan yang menekankan keadilan dan keberlanjutan, BMT diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan modal usaha, tetapi juga mendorong pelaku UMKM untuk mengelola usahanya secara lebih produktif dan berkelanjutan. Namun demikian, hingga saat ini masih terbatas kajian empiris yang secara khusus mengkaji bagaimana peran BMT Agam Madani Koto Tengah dalam memberdayakan UMKM di Pasar Pakan Kamis, serta sejauh mana kontribusi peran tersebut terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 8, khususnya dalam aspek pertumbuhan ekonomi inklusif dan penciptaan pekerjaan yang layak.

Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai BMT dan pemberdayaan UMKM umumnya bersifat umum, mencakup wilayah yang lebih luas, atau berfokus pada aspek kelembagaan dan pembiayaan semata, sehingga belum mampu menggambarkan secara mendalam dinamika lokal pelaku UMKM di pasar tradisional, seperti karakteristik usaha, pola pemanfaatan pembiayaan, bentuk pendampingan yang diterima, serta kendala spesifik yang dihadapi pelaku usaha di tingkat akar rumput (Susanti et al., 2025). Kondisi tersebut mengindikasikan adanya celah penelitian (research gap) yang memerlukan pengkajian lebih mendalam dan komprehensif melalui studi lanjutan. kontekstual dan berbasis lokal, agar peran BMT dalam pemberdayaan UMKM dan kontribusinya terhadap pencapaian SDGs 8 dapat dipahami secara lebih komprehensif dan empiris.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Peran BMT Agam Mandani Koto Tengah**

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu jenis lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dalam bidang pembiayaan. Tujuan utama pendirian BMT adalah untuk memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui prosedur yang selaras dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariat Islam (Efendi & Wira, 2025). Dalam praktik operasionalnya, BMT menyalurkan pembiayaan dengan mengacu pada ketentuan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Secara etimologis, istilah BMT berasal dari kata baitul maal yang bermakna tempat penyimpanan atau pengelolaan dana Tamwil berarti pembiayaan, sehingga BMT memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun atau menyimpan dana serta sebagai penyedia pembiayaan bagi masyarakat yang memerlukan dukungan modal (Efendi & Mustika, 2025).

### **Pemberdayaan UMKM**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu penopang utama perekonomian Indonesia. Kontribusinya yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja menjadikan UMKM berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Efendi & Hsb, 2026). Di antara berbagai jenis usaha, UMKM di sektor sembako (sembilan bahan pokok) menempati posisi strategis karena berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat. Oleh sebab itu, pemahaman yang komprehensif mengenai strategi pemasaran yang dijalankan oleh pelaku usaha sembako sangat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan usaha mereka (Adaptif et al., 2025).

## **Mendukung Pencapaian SDGs 8**

SDGs 8 merupakan salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Decent Work and Economic Growth). Tujuan ini menekankan pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja yang layak, serta menekan tingkat pengangguran di berbagai lapisan masyarakat. (Hidayat et al., 2024).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah memahami fenomena sosial dalam konteks nyata, yaitu peran BMT Agam Madani Koto Tangah dalam pemberdayaan UMKM untuk mendukung pencapaian SDGs 8. Pendekatan kualitatif cocok untuk penelitian eksploratif yang menggali persepsi, pengalaman, serta strategi lembaga keuangan mikro dan pelaku UMKM secara mendalam tanpa menguji hipotesis numerik. Metode ini dilaksanakan dengan cara menggali data dari narasumber utama melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, sehingga fenomena dapat dijelaskan secara detail berdasarkan konteks lokal yang menjadi fokus penelitian (Bahiyah & Gumindari, 2024). Dalam pelaksanaannya, penelitian ini akan mengikuti beberapa tahapan sebagai berikut:

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara menyeluruh, khususnya peran BMT Agam Madani Koto Tangah dalam pemberdayaan UMKM di Pasar Pakan Kamis, dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan makna subjektif yang dirasakan oleh pelaku di lapangan, sehingga hasil penelitian dapat merefleksikan realitas sosial secara utuh dan mendalam (Sugiyono, 2020).

Pendekatan deskriptif dipilih agar penelitian tidak hanya menggambarkan fakta-fakta yang terjadi, tetapi juga mampu menyajikan gambaran yang sistematis dan terstruktur mengenai dinamika pemberdayaan UMKM, termasuk strategi yang diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta dampak yang dihasilkan bagi pengusaha mikro dan perekonomian lokal.

Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menjelaskan hubungan sebab-akibat secara rinci antara kegiatan BMT dalam menyalurkan pembiayaan syariah dengan peningkatan kapasitas dan produktivitas UMKM, serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang peran serta kontribusi lembaga keuangan mikro dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama SDGs 8 yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan penyediaan pekerjaan yang layak. (Bahiyah & Gumindari, 2024).

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Pakan Kamis, Kecamatan Koto Tangah, Kota, yang merupakan pusat kegiatan UMKM yang menjadi nasabah BMT Agam Madani. Pasar ini dipilih karena memiliki konsentrasi tinggi pelaku usaha mikro, termasuk pedagang barang dan jasa, serta home industry yang tersebar di berbagai sektor. Lokasi ini memungkinkan penelitian untuk memperoleh data langsung terkait interaksi antara BMT dan pelaku UMKM, strategi pemberdayaan yang diterapkan, serta dampak pembiayaan terhadap pengembangan usaha mikro di pasar tersebut.

Waktu penelitian direncanakan dilaksanakan dalam kurun waktu tiga bulan, yakni sejak Oktober hingga Desember 2025. Periode ini dipilih karena mencakup waktu yang memadai untuk melakukan pengumpulan data secara menyeluruh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Selain itu, rentang waktu ini memungkinkan peneliti untuk melakukan verifikasi data dan melakukan triangulasi sumber agar hasil penelitian memiliki tingkat keabsahan yang tinggi. Kegiatan penelitian diawali dengan tahap perizinan dan pengenalan

lapangan, dilanjutkan dengan pengumpulan data utama, dan diakhiri dengan proses analisis data serta validasi temuan.

Dalam penelitian ini, sumber data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder, agar informasi yang diperoleh lengkap, valid, dan relevan dengan fokus penelitian tentang peran BMT Agam Madani Koto Tangah dalam pemberdayaan UMKM di Pasar Pakan Kamis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran BMT Agam Madani Koto Tangah dalam pemberdayaan UMKM di Pasar Pakan Kamis. Data primer diperoleh langsung dari pelaku utama dalam penelitian, yaitu pengelola BMT, manajer pembiayaan, serta pengusaha mikro yang menjadi nasabah BMT. Data primer ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami secara langsung pengalaman, persepsi, dan strategi pemberdayaan yang diterapkan oleh BMT, termasuk efektivitas program pembiayaan berbasis syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah (Nafsiah et al., 2022).

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan literatur terkait, seperti laporan tahunan BMT, catatan pembiayaan UMKM, statistik jumlah UMKM di Pasar Pakan Kamis, dokumen peraturan terkait UMKM dan keuangan mikro syariah, serta jurnal ilmiah yang membahas pemberdayaan ekonomi mikro dan pencapaian SDGs 8. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis, memverifikasi informasi dari data primer, serta memberikan konteks teoretis dan empiris terhadap fenomena yang diamati. Dengan kombinasi kedua sumber data ini, penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang menyeluruh dan valid mengenai kontribusi BMT dalam meningkatkan kapasitas, pendapatan, dan daya saing UMKM di wilayah penelitian.

Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu metode penentuan responden secara sengaja berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Relevansi dan kemampuan untuk memberikan informasi yang diperlukan penelitian (Efendi & Mansur, 2023). Informan utama meliputi individu atau pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan, proses, atau fenomena yang menjadi fokus penelitian. pemberdayaan UMKM melalui BMT Agam Madani Koto Tangah. Pertama, pengelola BMT, termasuk manajer dan staf bagian pembiayaan, dipilih karena memiliki tanggung jawab dalam merancang, menyalurkan, dan memonitor program pembiayaan bagi UMKM. Kedua, pengusaha mikro yang menjadi nasabah BMT dijadikan informan untuk memberikan perspektif tentang pengalaman langsung mereka terkait akses pembiayaan, penggunaan modal kerja, dan dampak pemberdayaan terhadap pengembangan usaha.

Selain itu, penelitian juga melibatkan pihak pendukung seperti tokoh pasar, pelaku koperasi lokal, atau pendamping UMKM, yang dapat memberikan informasi tambahan mengenai kondisi sosial-ekonomi UMKM, dinamika pasar, serta kontribusi BMT dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Jumlah informan ditetapkan berdasarkan prinsip kejenuhan data, yaitu kondisi ketika proses wawancara tidak lagi menghasilkan informasi baru atau temuan tambahan yang signifikan sudah tidak memberikan temuan atau data tambahan yang berbeda dari informasi sebelumnya yang relevan. Pemilihan informan secara representatif ini dengan maksud mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang peran BMT dalam proses pemberdayaan UMKM sekaligus kontribusinya terhadap pencapaian tujuan SDGs 8.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran BMT Agam Madani Koto Tangah dalam Memberikan Pembiayaan Usaha kepada Pelaku UMKM di Pasar Pakan Kamis**

Lembaga keuangan mikro syariah, khususnya Baitul Maal wa Tamwil (BMT), memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian lokal, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di pasar tradisional. Keberadaan BMT menjadi alternatif sumber pembiayaan yang mudah diakses, bebas riba, serta sesuai dengan prinsip syariah bagi pelaku UMKM yang umumnya mengalami keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh BMT berkontribusi langsung terhadap peningkatan kapasitas modal, kelancaran operasional usaha, serta keberlanjutan aktivitas ekonomi UMKM.

Hasil penelitian lapangan di Pasar Pakan Kamih menunjukkan bahwa BMT Agam Madani Koto Tangah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyedia pembiayaan, tetapi juga berperan sebagai mitra dalam proses pemberdayaan dan pengembangan usaha para pelaku UMKM. Pembiayaan berbasis akad syariah disalurkan melalui mekanisme yang relatif sederhana dan bertahap, dimulai dari keanggotaan, pemenuhan simpanan pokok dan simpanan wajib, pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan usaha, hingga pencairan dana dan pemantauan pasca pembiayaan. Skema pembiayaan disesuaikan dengan kondisi dan skala usaha masing-masing UMKM, sehingga mengurangi risiko pembiayaan bermasalah dan menjaga keberlanjutan usaha anggota.

Berdasarkan analisis menggunakan Teori Peran, BMT Agam Madani Koto Tangah telah menjalankan fungsi sosial dan ekonominya sesuai dengan kedudukannya sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Hal ini tercermin dari penyaluran pembiayaan, pendampingan usaha, serta pengawasan penggunaan dana yang dilakukan secara berkelanjutan. Pelaku UMKM memandang BMT tidak hanya sebagai sumber modal, tetapi juga sebagai mitra yang memberikan arahan, membangun kedisiplinan, serta menumbuhkan tanggung jawab dalam pengelolaan usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah pelaku UMKM, diketahui bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BMT berkontribusi positif dalam meningkatkan tingkat kelayakan usaha serta menjaga kestabilan operasional bisnis mereka. Modal awal yang relatif kecil, berkisar antara Rp2.000.000 hingga Rp3.000.000, dimanfaatkan secara produktif untuk pengadaan bahan baku, peningkatan kapasitas produksi, serta menunjang operasional usaha sehari-hari. Pembiayaan tersebut mendorong kelancaran perputaran modal, meningkatkan kontinuitas produksi, serta membantu pelaku usaha bertahan di tengah fluktuasi kondisi pasar.

Selain aspek permodalan, kemudahan prosedur dan persyaratan pembiayaan menjadi faktor utama yang mendorong UMKM memilih BMT sebagai sumber pendanaan. Proses yang tidak berbelit-belit dinilai sesuai dengan karakteristik usaha mikro, sehingga memperluas inklusi keuangan di kalangan pedagang pasar tradisional. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa BMT Agam Madani Koto Tangah berperan signifikan dalam mendukung perkembangan dan keberlanjutan UMKM di Pasar Pakan Kamih, baik dari sisi ekonomi maupun sosial, serta berkontribusi dalam membangun ekosistem usaha yang lebih inklusif, tertib, dan berkelanjutan.

### **B. Keterkaitan Peran BMT Agam Madani Koto Tangah Dalam Pemberdayaan UMKM Tersebut Dengan Upaya Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs) 8, Khususnya Pada Aspek Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Dan Penyediaan Pekerjaan Yang Layak**

Peran BMT Agam Madani Koto Tangah dalam pemberdayaan UMKM memiliki keterkaitan yang kuat dengan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 8, yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta penyediaan pekerjaan layak (Tussa, 2024). Secara logis, pembiayaan BMT kepada pelaku

UMKM seperti usaha mukena kerancang, kerupuk ubi, atau usaha sarapan kecil membantu memperkuat akses modal salah satu hambatan terbesar bagi usaha mikro kecil menengah sehingga mereka dapat mempertahankan dan mengembangkan usaha secara lebih produktif dan berkelanjutan; hal ini sejalan dengan target SDGs 8 yang mendorong perluasan akses terhadap jasa keuangan untuk UMKM sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi yang inklusif (melalui akses ke layanan keuangan) sekaligus bagian dari penciptaan lapangan kerja produktif yang layak bagi masyarakat luas.

Usaha mikro dan BMT syariah memiliki model serta karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan bank umum syariah maupun unit usaha syariah. Saat ini, BMT belum menyediakan produk yang memungkinkan layanan pertukaran lintas rekening bagi nasabah. Tanpa fasilitas seperti kartu ATM, rekening giro, cek, atau transfer kawat, interaksi antara nasabah dan lembaga menjadi lebih langsung dan personal. Apabila nasabah ingin melakukan setoran atau penarikan dana, mereka perlu datang langsung ke kantor BMT. Demikian pula, jika nasabah mengambil pembiayaan pada waktu tertentu, pembayaran kewajiban sebaiknya dilakukan secara langsung di kantor BMT, mirip dengan prosedur di bank konvensional.

Keduanya memiliki orientasi yang sejalan, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. SDGs berupaya mendorong pemerataan ekonomi sekaligus memperkuat peran lembaga keuangan mikro syariah dalam menyediakan akses layanan keuangan yang mudah dijangkau, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Lembaga keuangan mikro berfungsi sebagai sarana pendukung inklusi keuangan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. memiliki peran penting dalam pencapaian SDGs, salah satunya dengan menyediakan modal usaha bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, setiap orang memiliki kesempatan untuk mengakses layanan keuangan yang berkualitas, termasuk berbagai produk investasi. Lembaga keuangan mikro berbasis syariah perlu memahami urgensi hal tersebut serta memperkenalkan berbagai bentuk investasi kepada masyarakat secara luas, sehingga mereka memiliki peluang memperoleh tambahan pendapatan sekaligus memperluas dampak manfaat ekonomi bagi lingkungan sekitarnya. (Putri et al., 2024).

Pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan BMT mencerminkan prinsip inklusivitas ekonomi yang digariskan oleh SDGs 8. Dengan memberikan modal kepada pelaku usaha yang sebelumnya tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal, BMT membantu memperluas partisipasi kelompok rentan dalam aktivitas ekonomi produktif. Pembiayaan ini memungkinkan UMKM meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas usaha, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan usaha yang berkelanjutan even ketika hasilnya tidak selalu stabil, pembiayaan tetap menjadi fondasi awal bagi pengembangan usaha. Kondisi tersebut selaras dengan sasaran SDGs 8 yang menekankan pentingnya mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah melalui peningkatan akses terhadap layanan dan fasilitas keuangan yang lebih inklusif dan berkualitas. (Trimulato & Nuringsih, 2019). keterkaitan peran BMT Agam Madani Koto Tangah dalam pemberdayaan UMKM dengan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 8, khususnya pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan penyediaan pekerjaan yang layak:

1. Meningkatkan inklusi ekonomi melalui akses pembiayaan UMKM
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, perluasan peluang kerja yang produktif dan merata serta penyediaan pekerjaan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat
3. Meningkatkan stabilitas ekonomi lokal

BMT Agam Madani telah menunjukkan peran yang nyata dan relevan dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) tujuan ke-8, yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Peran tersebut tercermin dari komitmen BMT Agam Madani dalam menyediakan akses pembiayaan yang

inklusif, mudah dijangkau, dan sesuai dengan karakteristik pelaku usaha berskala mikro dan kecil, terutama yang beroperasi di kawasan Koto Tengah dan daerah sekitarnya (Trimulato & Nuringsih, 2019).

Melalui penyaluran pembiayaan berbasis prinsip Syariah dengan berlandaskan prinsip syariah yang mengedepankan nilai keadilan, kemitraan, serta keberlanjutan, BMT tidak sekadar berperan sebagai lembaga keuangan alternatif, melainkan juga sebagai sarana dalam mendorong pemberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Pembiayaan yang disalurkan mendorong pelaku usaha untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan sumber pendapatan yang lebih stabil.

Keberadaan BMT Agam Madani memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi lokal melalui penguatan sektor usaha mikro yang menjadi fondasi utama perekonomian masyarakat. Dukungan pembiayaan yang disalurkan memungkinkan pelaku UMKM mempertahankan keberlangsungan usaha, berkembang secara bertahap, serta menciptakan peluang kerja bagi masyarakat di sekitarnya. Kondisi ini selaras dengan tujuan SDGs 8 yang menekankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan produktivitas usaha, serta perluasan kesempatan kerja yang layak, khususnya di sektor informal dan usaha mikro. Dengan demikian, peran BMT Agam Madani tidak hanya memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan para pelaku usaha secara individu, tetapi juga membawa manfaat yang lebih luas bagi lingkungan ekonomi dan masyarakat di sekitarnya memperkuat struktur ekonomi masyarakat secara lebih adil, mandiri, dan berkelanjutan (Prastiawati et al., 2016).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu kerangka pembangunan global yang disusun untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif dan berkelanjutan. Konsep SDGs menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan serta produktivitas masyarakat, dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan sosial, sehingga setiap individu memperoleh peluang yang adil dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Adil untuk memperoleh kehidupan yang layak. Selain itu, SDGs juga berorientasi pada upaya menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan hidup agar proses pembangunan tidak menimbulkan kerusakan yang berdampak jangka panjang (Bidang et al., n.d.). Pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Agam Madani dimanfaatkan secara langsung oleh pelaku UMKM untuk memperkuat struktur permodalan usaha, sehingga mereka memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjaga kelangsungan aktivitas produksi dan perdagangan secara berkelanjutan. Dukungan permodalan ini memungkinkan pelaku usaha memenuhi kebutuhan bahan baku, membiayai operasional harian, serta mengatur perputaran modal dengan lebih terencana, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap terciptanya stabilitas pendapatan.

Keberadaan pembiayaan BMT menjadi sangat penting, terutama bagi UMKM yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal akibat persyaratan yang rumit dan keterbatasan agunan. Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, pembiayaan dari BMT berperan sebagai penopang utama agar usaha tetap bertahan dan tidak mengalami penghentian aktivitas. Salah satu pendorong utama percepatan pertumbuhan UMKM di Indonesia adalah keberadaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Dalam upaya mengatasi permasalahan keuangan pada tingkat mikroekonomi, BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah menjadi alternatif yang relevan dan efektif. BMT beroperasi tanpa praktik riba yang dilarang dalam Islam serta menjalankan seluruh kegiatannya sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT mengumpulkan dana dari masyarakat melalui beragam produk tabungan dan instrumen investasi, lalu menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan atau dukungan usaha pelaku UMKM yang membutuhkan pembiayaan usaha. (Tussa, 2024)

peran BMT Agam Madani dalam mendukung UMKM tersebut sejalan dengan indikator SDGs 8 yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas usaha mikro dan kecil sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Dengan memperkuat UMKM, BMT turut mendorong terciptanya sumber pendapatan yang layak, memperluas kesempatan kerja di tingkat lokal, serta mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat.

Selain berperan sebagai penyedia pembiayaan, BMT Agam Madani juga memiliki kontribusi penting dalam mendorong terciptanya pekerjaan yang layak melalui keberlangsungan dan penguatan usaha para nasabahnya. Usaha-usaha mikro yang memperoleh dukungan dari BMT tidak hanya menjadi sumber penghidupan utama bagi pemilik usaha, tetapi juga mampu melibatkan anggota keluarga serta masyarakat sekitar dalam aktivitas produksi, distribusi, maupun pelayanan. Keterlibatan ini secara tidak langsung membuka peluang kerja baru di tingkat lokal, khususnya di sektor informal yang selama ini menjadi tumpuan sebagian besar masyarakat.

keberlanjutan usaha yang terjaga berkat dukungan permodalan dari BMT membantu menciptakan stabilitas pendapatan dan meningkatkan kualitas pekerjaan, karena aktivitas usaha dapat dilakukan secara lebih tertib, berkelanjutan, dan produktif. Dengan semakin banyaknya usaha mikro yang mampu bertahan dan berkembang, peran BMT Agam Madani turut berkontribusi dalam menekan angka pengangguran serta memperkuat struktur ketenagakerjaan di sektor informal. Hal ini sejalan dengan fokus utama SDGs 8 yang menitikberatkan pada penyediaan kesempatan kerja yang layak, peningkatan tingkat produktivitas, serta pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat serta berkelanjutan, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan pelaku usaha mikro.

Pendekatan yang diterapkan oleh BMT Agam Madani dengan mengedepankan kemudahan proses pembiayaan, kedekatan institusional dengan masyarakat, serta adanya pendampingan usaha secara berkelanjutan terbukti mendorong terciptanya pola pengelolaan usaha yang lebih disiplin dan bertanggung jawab di kalangan pelaku UMKM. Kemudahan prosedur membuat pelaku usaha lebih mudah mengakses permodalan, sementara kedekatan BMT dengan lingkungan sosial nasabah menciptakan hubungan yang bersifat personal dan saling percaya. Kondisi ini mendorong nasabah untuk lebih bertanggung jawab dalam memanfaatkan pembiayaan yang diterima (Laili & Kusumaningtias, 2020).

Selain itu, kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan usaha dan pemenuhan kewajiban pembayaran pembiayaan menjadi bagian penting dari proses pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT. Para pelaku usaha diarahkan untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan usahanya secara lebih efektif dan berkelanjutan arus kas secara lebih tertib, memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga, serta merencanakan penggunaan modal secara lebih rasional. Pola pengelolaan usaha yang demikian membantu menciptakan usaha yang lebih stabil, berkelanjutan, dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Dengan demikian, pendekatan BMT Agam Madani turut mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang stabil, inklusif, dan tidak eksploitatif, sejalan dengan semangat SDGs 8 yang menekankan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini Peran BMT Agam Madani Koto Tangah dalam Pemberdayaan Umkm di Pasar Pakan Kamih dalam Mendukung Pencapaian SDGs 8 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Agam Madani Koto Tangah memiliki peran strategis dalam memberikan pembiayaan usaha kepada pelaku

UMKM di Pasar Pakan Kamis melalui skema pembiayaan syariah yang relatif mudah diakses, adil, dan sesuai dengan kebutuhan usaha mikro. Berdasarkan temuan lapangan, pembiayaan yang disalurkan tidak hanya berperan sebagai sumber tambahan modal usaha, tetapi juga memberikan dukungan kepada pelaku UMKM dalam mengembangkan serta memperkuat pengelolaan usahanya menjaga kelangsungan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperbaiki pengelolaan keuangan secara lebih disiplin.

Kedua, eterkaitan peran BMT Agam Madani Koto Tangah dengan pencapaian SDGs 8 tercermin dari kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata serta penciptaan kesempatan kerja yang layak dan berkelanjutan di tingkat lokal. Temuan lapangan menunjukkan bahwa peningkatan modal usaha melalui pembiayaan BMT berdampak pada bertambahnya pendapatan pelaku UMKM, stabilitas usaha, serta kemampuan sebagian pelaku usaha untuk mempertahankan bahkan menambah tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan tujuan SDGs 8 yang menekankan peningkatan produktivitas dan kesempatan kerja. Meskipun demikian, kontribusi BMT terhadap pencapaian SDGs 8 masih bersifat parsial dan memerlukan penguatan, terutama melalui peningkatan pendampingan usaha yang terstruktur, sosialisasi produk pembiayaan yang lebih luas, serta penguatan literasi keuangan agar dampak pemberdayaan UMKM dapat lebih berkelanjutan dan merata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adaptif, S., Umkm, P., & Di, S. (2025). Strategi adaptif pemasaran umkm sembako di desa setono.
- Aftitah, F. N., K, J. L., Hasanah, K., Lailatul, N., Bina, U., & Informatika, S. (2025). Pengaruh UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Tahun 2023 Pemerintah mendukung UMKM melalui program seperti Kredit Usaha Rakyat ( KUR ), meskipun penyalurannya tahun 2023 belum memenuhi target . *UMKM kini terus*. 3, 32–43.
- Bahiyah, U., & Gumiandari, S. (2024). Metode Penelitian. In *General and Specific Research* (Vol. 4, Issue 2).
- Bidang, K., Dan, K., & Daya, S. (n.d.). Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals(SDGs).
- Darmawan, D. (2025). Realizing Just Sustainability through Public Policies Responsive to Social Inequalities.
- Efendi, E. C., & Hsb, H. J. (2026). Optimizing Halal Msme Financing Through Artificial Intelligence-Based Sharia Fintech To Increase Economic Independence. *Mbisku: Jurnal Manajemen Bisnis Dan Keuangan*, 3(1), 1–12.
- Efendi, E. C., & Mansur, Y. (2023). Analisis Strategi Pemasaran Produk Deposito Mudharabah Pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas KC Padang Panjang. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 3(1), 54–66.
- Efendi, E. C., & Mustika, R. (2025). Strategy to Optimize Sharia Financial Management as an Instrument to Improve the Performance of Halal MSMEs in West Sumatra. *INCOME: Innovation of Economics and Management*, 5(2), 49–57.
- Efendi, E. C., & Wira, A. (2025). Peran Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mendukung Kebutuhan Perekonomian Masyarakat Indonesia. *Mbisku: Jurnal Manajemen Bisnis Dan Keuangan*, 2(1), 49–60.
- Fitria, E. N., & Qulub, A. S. (2020). Peran Bmt Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Pembiayaan Bmt Padi Bersinar Utama Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(11), 2303. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201911pp2303-2330>
- Hapsari, Y. A., Apriyanti, P., Hermiyanto, A., & Rozi, F. (2024). Analisa Peran UMKM Terhadap Perkembangan Ekonomi di Indonesia. 4.
- Hendri, L. (2018). Untuk Umkm Di Seluruh Indonesia. 2(2).
- Hidayat, S. M., Aditya, D. I., Syari, M. H. A., Arifin, F., Syah, M. A., & Irawan, N. A. (2024). SDGS 8: Upaya Peningkatan Kualitas Konten Reels Di UMKM necerel.id. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(9), 984–993. <https://doi.org/10.59837/jhf56m40>
- Jurnal, J., Mea, I., Keuangan, P. L., & Dan, I. K. (2025). Digital Payment Terhadap Kinerja Keuangan Umkm Jimea | *Jurnal Ilmiah MEA ( Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi )*. 9(3), 538–556.

- Karangnom, K., Desa, D. A. N., Jatinom, K., & Klaten, K. (2023). Implementasi Sustainable Development Goals ( Sdgs ), Goal 8 Pada Pelaku Usaha Mikro Di Desa Padas ,. 0832, 107–116.
- Laili, N. Y., & Kusumaningtias, R. (2020). Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM ( Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo ). 6(03), 436–443.
- Lou, J., Rader, A., Gultom, Y. M. L., Hilde, T. C., & Hultman, N. (2024). Navigating SDG 8 in the decarbonizing landscape of emerging economies : a case study of Indonesia.
- Mikro, U., & Umkm, D. A. N. M. (2015). Profil bisnis usaha mikro, kecil dan menengah (umkm).
- Mulia, Y., & Sitepu, R. (2023). Peran UMKM dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. 1(2), 99–108. <https://doi.org/10.37985/benefit.v1i1.14>
- Nafsiah, G., Adawiyah, R., & Billah, Z. I. (2022). Analisis Persepsi Nasabah Bmt Masalah Capem Gending Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro. 10(3), 1121–1132.
- Nasution, Z. A., Syakir, A., & Yanti, N. (2024). Peran Bmt Raudhah Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Dan Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kualitatif Kontribusi Bmt Raudhah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Lokal. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Учредители: Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor*, 5(11).
- Prastiawati, F., Darma, E. S., Akuntansi, P., Muhammadiyah, U., Selatan, J. L., & Yogyakarta, D. I. (2016). Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional. 17(2), 197–208. <https://doi.org/10.18196/jai.2016.0055.197-208>
- Pratiwi, A. D., Salahudin, S., Syamsulrizal, S., & Prakoso, H. A. (2023). The economic development of Asian countries with achievement of SDG 8: A systematic literature review. *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 13(1), 92–105.
- Putri, A. N., Apriani, A., Ardiansyah, M. A. F., Asiillah, R. A. A., Okta, D., & Sari, V. (2024). Keuangan Mikro Syariah Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan : Menyelaraskan Prinsip Dengan Praktik tanpa melakukan pelanggaran . Tujuan kajian ini adalah menjadikan Islam bermanfaat melakukan penelitian mendalam guna mengembangkan ilmu keislaman yang bermanfaat. 2(1), 99–108.
- Seyedsayamdost, E. (2020). *Sustainable Development Goals*. Routledge.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Susanti, S., Anisah, A., Mulyana, C. A., Syech, U. I. N., & Djambek, M. D. (2025). Analisis Peran UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Pelaku UMKM Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam di Pasar Nagari Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat. 9, 32184–32194.
- Syafira rahmi, D. (2025). Peranan Pembiayaan Baitul Mal Wat (Bmt) Agam Madani Terhadap Perkembangan Umkm Di Kenagarian Pakan Sinayan. 11.
- Tamwil, W. A. T., & Syariah, A. (2024). Harahap, R. (2024). Peranan baitul maal wat tamwil dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (studi kasus pada baitul maal wat tamwil amanah syariah pasaman). 1(1), 1–14.
- Trimulato, T., & Nuringsih, N. (2019). Keterkaitan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dengan Agenda Sustainable Development Goals (SDGs). *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 159–174.
- Tussa, F. (2024). Paraduta : Jurnal Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Peran Baitul Maal Wat Tamwil ( BMT ) Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melalui UMKM. 2(2), 58–63.
- Zen, N. H., & Mageiasti, L. (2025). Analisis Penerapan SDGs dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Tinjauan Literatur dan Tantangan Implementasi. 3, 775–785.
- Zuhdi, S., & Sukartaatmadja, I. (2023). Pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Meningkatkan Kualitas Produk Pada UMKM Kelurahan Gudang Kota Bogor. 4(2), 115–122. <https://doi.org/10.37641/jadkes.v4i1.2422>.